

## BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Anak Air dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan dana BOK di Puskesmas Anak Air berpedoman kepada petunjuk teknis permenkes No. 86 Tahun 2019 dan Permenkes No. 12 Tahun 2021. Dalam pengelolaannya terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pencairan dana karena perubahan peraturan, perbaikan SPJ yang belum sesuai dan keterlambatan puskesmas dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke Dinas Kesehatan Kota Padang. Adapun pelaksanaan kegiatan belum sesuai dari segi waktu dan volume kegiatan karena adanya pandemi COVID-19.

2. Komunikasi

Faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan BOK tersebut yaitu adanya transmisi berupa sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan kepada pihak puskesmas. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kejelasan isi juknis BOK yang belum dipahami petugas dan juknis BOK tidak konsisten yang berubah di pertengahan tahun dan mengganggu pelaksanaan kegiatan.

3. Sumber Daya

Adapun faktor yang mendukung, yaitu jumlah staf pengelola BOK sudah cukup, sarana prasarana sudah tersedia dan wewenang berupa SK yang berisi uraian tugas sebagai legitimasi pelaksanaan kebijakan BOK. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masalah kompetensi SDM yang belum

mendapat pelatihan sebagai pengelola BOK dan kesalahan SDM saat pelaksanaan kegiatan.

#### 4. Disposisi

Adapun faktor yang mendukung tersebut adalah adanya respon positif pelaksana kebijakan yang sangat mendukung kebijakan BOK. Dapat dilihat dari tindakan nyata berupa pelaksanaan sebagai perwujudan dukungan terhadap kebijakan BOK serta adanya insentif untuk pengelola BOK. Sementara yang menjadi faktor penghambat adalah pengaturan birokrasi yang belum memiliki kriteria khusus.

#### 5. Struktur Birokrasi

Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan BOK yaitu belum adanya dokumen SOP untuk pengelolaan BOK dan belum optimalnya pembagian tugas dan tanggung jawab yang dibuat oleh Kepala Puskesmas sehingga dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan kebijakan BOK.

### 6.2 Saran

- a. Puskesmas agar membuat kesepakatan bersama yang disetujui oleh pimpinan puskesmas untuk waktu pengumpulan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
- b. Kepala puskesmas melakukan evaluasi terhadap penempatan staf agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Perlunya pembentukan tim khusus di puskesmas yang bukan tenaga fungsional untuk mengelola masalah pembiayaan sehingga masalah beban ganda petugas pengelola dapat dihindari, ditambah lagi dengan akan semakin meningkatnya beban pekerjaan di puskesmas pada tahun-tahun mendatang.
- c. SDM yang terlibat dalam pengelolaan BOK diberi bekal materi yang cukup, sistem pelaporan dan pertanggung jawaban perlu dilakukan penyempurnaan

tanpa harus mengurangi akurasi dukungan dokumen, hal tersebut diharapkan bisa mengurangi kesulitan dan keterlambatan pelaporan.

- d. Dinas Kesehatan setiap tahunnya perlu untuk mengadakan pelatihan manajemen dan P2KT (Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu) kepada SDM yang terkait langsung dengan pengelolaan maupun terlibat dalam program yang dibiayai BOK.
- e. Puskesmas dan dinas kesehatan kota meningkatkan sosialisasi isi kebijakan dana BOK terutama petunjuk teknis BOK agar semua petugas puskesmas paham isinya.
- f. Puskesmas membuat SOP pengelolaan dana BOK agar mudah pelaksanaan kebijakan dipahami oleh pemegang program dan sebagai panduan dalam membuat SPJ.
- g. Perlu peningkatan alokasi dana yang tepat waktu dari dinas kesehatan supaya tidak perlu ada peminjaman dana ataupun kegiatan yang dibiayai sendiri oleh petugas sehingga pelayanan kesehatan tidak terhambat.
- h. Kementrian kesehatan hendaknya mengeluarkan petunjuk teknis di awal tahun agar tidak mengganggu perencanaan dan pelaksanaan program.

